



**Beujroh :**

Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat

Volume 4, Nomor 2, Agustus 2026 pp. 523-544

DOI <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i2.939>

e-ISSN 3025-9320

p-ISSN 3026-0884

# Rehabilitasi dan *Collaborative Governance* Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Pemagangan Di Kabupaten Pidie Jaya

Zuliden Jayus<sup>1\*</sup>, Halimah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Jabal Ghafur, Indonesia, email: [zjayus@gmail.com](mailto:zjayus@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Jabal Ghafur, Indonesia, email: [halimahunigha@gmail.com](mailto:halimahunigha@gmail.com)

\*Koresponden penulis : [zjayus@gmail.com](mailto:zjayus@gmail.com)

## Info Artikel

**Diajukan:** 30 Mei 2026

**Diterima:** 17 Juni 2026

**Diterbitkan:** 10 Juli 2026

### **Keywords:**

*Collaborative Governance; post-disaster rehabilitation; economic recovery; internship program; Pidie Jaya Regency.*

## Abstract

*Flooding is one of the most frequent hydrometeorological disasters in Indonesia, causing significant social and economic impacts on affected communities. Beyond damaging infrastructure, floods disrupt economic activities, reduce household income, eliminate livelihoods, and increase social vulnerability. Therefore, post-disaster rehabilitation should focus not only on physical reconstruction but also on sustainable economic recovery through community empowerment. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in post-flood economic recovery in Pidie Jaya Regency through an internship-based empowerment program. A qualitative descriptive approach was employed to explore the collaborative processes among stakeholders involved in the rehabilitation program. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving local government agencies, private sector representatives, vocational training institutions, and flood-affected communities. The data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the application of Collaborative Governance strengthens coordination and cooperation among stakeholders in designing and implementing economic rehabilitation programs. Internship-based training contributes to improving participants' vocational skills, employability, and entrepreneurial capacity, thereby accelerating local economic recovery. However, the implementation of the program still faces several challenges, including limited cross-sectoral*

**Kata Kunci:**

Collaborative  
Governance,  
rehabilitasi  
pascabencana,  
pemulihan ekonomi,  
pemagangan,  
Kabupaten Pidie Jaya.



**Lisensi:** cc-by-sa  
Copyright © 2026  
penulis

*coordination, financial constraints, and the sustainability of partnerships with the private sector. Strengthening collaborative institutions, integrating public policies, and expanding partnerships are essential to ensure that internship-based rehabilitation becomes an effective and sustainable model for post-disaster economic recovery.*

**Abstrak**

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain menimbulkan kerusakan infrastruktur, banjir menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, hilangnya mata pencaharian, menurunnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya kerentanan sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi pascabencana perlu diarahkan tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam pemulihan ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya melalui program pemagangan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta masyarakat terdampak banjir. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance mampu memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi ekonomi. Program pemagangan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan, kompetensi kerja, dan peluang usaha masyarakat sehingga mendukung percepatan pemulihan ekonomi pascabencana. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi lintas sektor, pendanaan, serta keberlanjutan kemitraan dengan dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan kolaboratif, dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, serta pengembangan kemitraan yang berkelanjutan agar rehabilitasi ekonomi berbasis

---

pemagangan dapat menjadi model pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan.

---

***Cara mensitasi artikel:***

Jayus, Z., & Halimah. (2026). Rehabilitasi dan Collaborative Governance Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Pemagangan Di Kabupaten Pidie Jaya. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 523-544. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i2.939>

---

**PENDAHULUAN**

Bencana banjir merupakan salah satu fenomena hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek sosial dan ekonomi. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta pekerja sektor informal. Akibatnya, banyak masyarakat kehilangan sumber penghidupan, mengalami penurunan pendapatan, dan menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini mengalami kejadian banjir berulang yang berdampak pada sektor pertanian, perdagangan, perikanan, serta usaha rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dampak yang lebih kompleks terlihat pada peristiwa banjir besar pada akhir tahun 2025 yang berlanjut hingga tahun 2026, di mana banjir susulan terjadi secara berulang dan memperburuk kondisi pemulihan pascabencana. Banjir tersebut mengakibatkan ribuan rumah terdampak, terganggunya aktivitas ekonomi lokal, kerusakan fasilitas publik, serta melambatnya proses pemulihan ekonomi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi pascabencana masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama ini, pendekatan penanganan pascabencana di berbagai daerah cenderung berfokus pada bantuan darurat, rehabilitasi fisik, dan pemulihan infrastruktur. Meskipun pendekatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan jangka panjang berupa pemulihan kapasitas ekonomi masyarakat terdampak. Bantuan yang bersifat konsumtif sering kali tidak menghasilkan dampak berkelanjutan apabila tidak disertai dengan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan keterampilan kerja, dan penciptaan peluang usaha produktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah program pemagangan berbasis kebutuhan dunia kerja. Pemagangan merupakan bentuk pembelajaran berbasis praktik yang mengintegrasikan keterampilan teknis dan nonteknis melalui pengalaman kerja langsung di dunia usaha dan dunia industri. Program ini memungkinkan masyarakat terdampak bencana untuk memperoleh kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan usaha mandiri. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pemagangan tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Konsep *collaborative governance* sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, melalui dialog, konsensus, serta pembagian peran yang jelas. Pendekatan ini dinilai relevan dalam konteks rehabilitasi ekonomi pascabencana karena mampu mengintegrasikan sumber daya, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas program melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh dinamika keterlibatan aktor, kapasitas

kelembagaan, serta keberlanjutan komitmen bersama dalam mencapai tujuan kolektif.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang berdasarkan pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan konsep *\*collaborative governance\** dalam upaya rehabilitasi ekonomi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya melalui program pemagangan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan sistem kolaborasi yang berkelanjutan untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan (*need assessment*) yang bertujuan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak banjir, termasuk jenis pekerjaan yang hilang, tingkat keterampilan masyarakat, serta potensi sektor ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan dunia usaha terkait kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan program pemagangan yang relevan dengan kondisi lapangan.

Tahap kedua adalah perencanaan program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum koordinasi dan diskusi kelompok terarah (FGD). Dalam tahap ini dilakukan penyusunan desain program pemagangan yang mencakup penentuan sektor prioritas, penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri, penetapan mitra dunia usaha, serta pembagian peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator, lembaga pelatihan sebagai penyusun materi dan pelaksana pelatihan, dunia usaha sebagai tempat magang, serta masyarakat sebagai peserta aktif program.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan program pemagangan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi dan praktik

kerja langsung di dunia usaha. Pada tahap ini peserta diberikan pembekalan keterampilan teknis dan nonteknis yang disesuaikan dengan bidang usaha mitra, seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan industri rumah tangga. Proses pemagangan dilakukan secara terstruktur dengan pendampingan dari instruktur atau mentor yang berasal dari lembaga pelatihan maupun dunia usaha. Selain itu, peserta juga diberikan pembinaan kewirausahaan untuk mendorong kemampuan menciptakan usaha mandiri setelah program selesai.

Tahap keempat adalah pendampingan dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah proses pemagangan berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi nyata, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha mandiri. Pada tahap ini juga dilakukan penguatan jejaring antara peserta, dunia usaha, dan pemerintah daerah untuk membuka akses terhadap peluang kerja dan permodalan usaha.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program pemagangan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan melihat indikator keberhasilan seperti peningkatan keterampilan kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta tumbuhnya usaha baru di kalangan peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program serta pengembangan model rehabilitasi ekonomi berbasis pemagangan yang lebih efektif dan berkelanjutan pada masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan rehabilitasi ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya melalui pendekatan collaborative governance berbasis program pemagangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses rehabilitasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup transformasi sistem tata kelola yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis pemberdayaan. Dalam konteks ini, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari output program, tetapi juga dari perubahan kapasitas masyarakat dan terbentuknya jejaring kolaborasi antaraktor.

**Transformasi Rehabilitasi Ekonomi Pascabanjir**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rehabilitasi ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya telah mengalami perkembangan penting, yaitu pergeseran dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis pemberdayaan. Pada tahap awal, rehabilitasi ekonomi pascabencana lebih banyak didominasi oleh intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan langsung, seperti bantuan modal usaha, distribusi logistik, serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat ekonomi masyarakat terdampak banjir, sehingga kebutuhan dasar dan keberlangsungan aktivitas ekonomi dapat segera dipulihkan.

Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pemulihan ekonomi jangka panjang. Banyak pelaku usaha mikro dan rumah tangga terdampak yang masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya setelah bantuan diterima. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendampingan pascabantuan, keterbatasan akses terhadap pasar, serta rendahnya kapasitas manajerial dan keterampilan usaha masyarakat. Akibatnya, sebagian bantuan modal usaha tidak berkembang secara optimal dan bahkan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara desain intervensi pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan berbagai program rehabilitasi ekonomi, namun di sisi lain masyarakat masih membutuhkan penguatan kapasitas yang lebih mendalam agar mampu mandiri secara ekonomi. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada bantuan material, tetapi juga harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia, akses informasi, serta peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan pengabdian ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis bantuan (*charity-based approach*) menuju pendekatan berbasis pemberdayaan (*empowerment-based approach*). Dalam pendekatan pemberdayaan, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima bantuan semata, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam proses pemulihan ekonomi. Pendekatan ini

menekankan pada peningkatan kapasitas, penguatan keterampilan, serta pembentukan kemandirian ekonomi melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma ini menjadi semakin relevan dalam konteks pascabencana, karena rehabilitasi ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana terjadi, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *build back better* yang menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bukan sekadar mengembalikan kondisi awal.

Dalam konteks Kabupaten Pidie Jaya, pendekatan *build back better* berarti bahwa rehabilitasi ekonomi harus diarahkan tidak hanya pada pemulihan aset dan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan jejaring ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu pulih dari dampak banjir, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Secara keseluruhan, transformasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menggeser fokus kebijakan dari sekadar distribusi bantuan menuju strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang.

### **Dinamika Implementasi Collaborative Governance**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam rehabilitasi ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya mulai terbentuk secara bertahap melalui keterlibatan multipihak. Dalam praktiknya, terdapat empat aktor utama yang berperan dalam proses kolaborasi ini, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat terdampak banjir. Keempat aktor tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah berperan sebagai *policy maker* sekaligus fasilitator utama yang mengoordinasikan seluruh proses kolaborasi. Peran ini mencakup perumusan kebijakan, penyediaan regulasi pendukung, serta penghubung



antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dunia usaha dan lembaga pelatihan. Dalam konteks pascabencana, peran pemerintah menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai pengarah utama dalam memastikan bahwa setiap intervensi berjalan sesuai dengan prioritas pemulihan ekonomi daerah.

Dunia usaha berperan sebagai penyedia ruang praktik kerja (*workplace learning*) sekaligus sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Keterlibatan dunia usaha tidak hanya terbatas pada penyediaan tempat pemagangan, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan praktis, pembentukan etos kerja, serta identifikasi kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Dengan demikian, dunia usaha menjadi aktor penting dalam memastikan bahwa program pemagangan memiliki relevansi dengan kebutuhan ekonomi riil.

Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi lokal pascabencana. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai penyedia instruktur, fasilitator pelatihan, serta evaluator terhadap capaian pembelajaran peserta. Keberadaan lembaga pelatihan memastikan bahwa proses peningkatan keterampilan tidak bersifat informal, tetapi terstruktur dan terukur.

Jika dianalisis menggunakan kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008), dinamika kolaborasi yang terjadi dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama. Pertama, *starting conditions*, yaitu adanya kondisi awal berupa kebutuhan bersama untuk melakukan pemulihan ekonomi pascabencana. Kondisi ini menjadi pendorong utama terbentuknya kolaborasi antaraktor, karena seluruh pihak menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir yang belum optimal.

Kedua, *institutional design*, yaitu mulai terbentuknya pembagian peran yang lebih jelas antaraktor dalam pelaksanaan program. Pemerintah berfungsi sebagai koordinator, dunia usaha sebagai mitra praktik, lembaga pelatihan sebagai penyedia kapasitas, dan masyarakat sebagai peserta aktif. Pembagian peran ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan struktur kolaborasi yang lebih terorganisir dibandingkan pendekatan sektoral sebelumnya.

Ketiga, *facilitative leadership*, di mana pemerintah daerah berperan sebagai aktor penghubung yang memfasilitasi komunikasi, koordinasi, serta penyelarasan kepentingan antar pihak. Kepemimpinan fasilitatif ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi, terutama dalam

konteks pascabencana yang memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu pemulihan yang mendesak.

Meskipun ketiga komponen tersebut telah mulai terbentuk, hasil kegiatan menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi masih berada pada tahap awal (*nascent collaboration*). Pada tahap ini, hubungan antaraktor masih cenderung bergantung pada pelaksanaan program tertentu dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk kebijakan atau kelembagaan permanen. Artinya, kolaborasi yang terbangun masih bersifat proyek-based dan belum menjadi sistem kerja jangka panjang yang stabil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasi *collaborative governance* telah menunjukkan arah yang positif dalam mendukung rehabilitasi ekonomi, namun diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, regulasi, serta mekanisme koordinasi yang lebih formal dan berkelanjutan agar kolaborasi dapat berkembang dari tahap awal menuju tahap kolaborasi yang lebih matang (*mature collaboration*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi sistem yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko bencana di masa mendatang.

### **Output Program Pemagangan dalam Rehabilitasi Ekonomi**

Program pemagangan sebagai bagian integral dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Pemagangan tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas pelatihan teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan kemampuan kerja yang cukup signifikan, baik dari aspek keterampilan teknis (*hard skills*) maupun keterampilan nonteknis (*soft skills*).

Pada aspek *hard skills*, peserta mengalami peningkatan kemampuan yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan pekerjaan di dunia usaha. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan produksi barang dan jasa, pelayanan pelanggan, administrasi usaha, pengelolaan usaha mikro, serta pengolahan produk lokal yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemagangan berhasil menjembatani kesenjangan antara keterampilan masyarakat sebelum program dengan

kebutuhan nyata dunia kerja. Sebagian peserta yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan spesifik kini mampu menjalankan tugas-tugas operasional secara mandiri di tempat kerja masing-masing.

Jika dianalisis lebih jauh, peningkatan keterampilan tersebut tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga memberikan efek lanjutan terhadap struktur ekonomi lokal. Peserta yang telah mengikuti program menunjukkan dua pola keluaran utama, yaitu integrasi ke dunia kerja formal maupun informal, serta inisiasi usaha mikro baru. Sebagian peserta berhasil terserap di dunia usaha mitra sebagai tenaga kerja, sementara sebagian lainnya memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha mandiri di sektor perdagangan, jasa, dan pengolahan produk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan berperan sebagai mekanisme transisi dari kondisi ekonomi rentan menuju kemandirian ekonomi.

Dari perspektif rehabilitasi ekonomi, output program ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Hal ini sejalan dengan konsep human capital development, yang menekankan bahwa investasi pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, pemagangan menjadi sarana efektif untuk mentransformasikan masyarakat terdampak bencana menjadi tenaga kerja yang lebih kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai capaian program, hasil kegiatan dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tabel

Output Program Pemagangan dalam Rehabilitasi Ekonomi

| Aspek            | Indikator                                            | Hasil yang Dicapai                                |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hard skills      | Produksi, pelayanan, administrasi, pengolahan produk | Meningkat signifikan sesuai kebutuhan dunia usaha |
| Soft skills      | Komunikasi, disiplin, kerja sama, etos kerja         | Terbentuk karakter kerja yang lebih profesional   |
| Penyerapan kerja | Akses ke dunia usaha mitra                           | Sebagian peserta terserap sebagai tenaga kerja    |

|                     |                                    |                                               |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kewirausahaan       | Inisiasi usaha mandiri             | Muncul usaha mikro baru berbasis keterampilan |
| Kemandirian ekonomi | Pengurangan ketergantungan bantuan | Peningkatan aktivitas ekonomi mandiri         |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa program pemagangan tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan keterampilan, tetapi juga outcome berupa peningkatan akses kerja dan tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap bantuan menuju orientasi produktif. Transformasi ini merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan rehabilitasi ekonomi pascabencana, karena mencerminkan adanya peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pemagangan tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan individual, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi lokal yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Output ini memperkuat posisi pemagangan sebagai salah satu strategi efektif dalam kerangka collaborative governance untuk mempercepat rehabilitasi ekonomi pascabanjir.

### **Pemagangan sebagai Mekanisme Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pemagangan memiliki peran strategis sebagai mekanisme transisi ekonomi dari kondisi rentan menuju kemandirian ekonomi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam konteks pascabencana, masyarakat umumnya berada pada situasi kehilangan sumber penghidupan, penurunan pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Oleh karena itu, intervensi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat jangka pendek dalam bentuk bantuan material, tetapi juga harus mampu membangun kembali kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, pemagangan berfungsi sebagai bridge mechanism yang menghubungkan masyarakat terdampak dengan dunia kerja dan dunia usaha. Fungsi jembatan ini menjadi sangat penting karena terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi keterampilan awal masyarakat dengan kebutuhan kompetensi di pasar kerja. Melalui program pemagangan, kesenjangan tersebut dapat dikurangi secara bertahap melalui proses pembelajaran berbasis praktik langsung (*work-based learning*) yang memungkinkan peserta untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, bukan hanya pengetahuan teoritis.

Pendekatan *work-based learning* dalam pemagangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja secara langsung, memahami standar operasional kerja, serta mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis secara simultan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kerja, tetapi juga membentuk pola pikir kerja yang lebih profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pemagangan berkontribusi pada peningkatan *employability* atau daya saing tenaga kerja masyarakat terdampak bencana.

Perkembangan usaha mikro yang dilakukan oleh alumni program pemagangan ini menciptakan efek berantai dalam perekonomian lokal. Di satu sisi, munculnya usaha baru meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara di sisi lain membuka peluang kerja informal bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya *multiplier effect* yang berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi pascabencana. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, efek ini menjadi indikator penting bahwa intervensi berbasis kapasitas manusia memiliki dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pemagangan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai program pelatihan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial ekonomi. Program ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam satu pendekatan yang saling mendukung. Oleh karena itu, pemagangan dapat dipandang sebagai strategi rehabilitasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi saat ini, tetapi juga pada pembangunan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemagangan memiliki posisi penting dalam kerangka rehabilitasi ekonomi berbasis *collaborative governance*, karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan

peluang ekonomi yang tersedia, sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat terdampak bencana.

### **Penguatan Kolaborasi Antaraktor**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antaraktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks collaborative governance, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama administratif, tetapi sebagai proses interaksi yang melibatkan dialog, pembagian peran, serta pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Pada kegiatan ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama yang mengarahkan, mengoordinasikan, serta memastikan keterhubungan antar aktor berjalan sesuai tujuan program. Namun demikian, efektivitas program tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan sangat bergantung pada partisipasi aktif dunia usaha, lembaga pelatihan, serta masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemulihan ekonomi.

Dunia usaha memiliki kontribusi penting dalam menyediakan ruang praktik kerja, akses pengalaman industri, serta peluang penyerapan tenaga kerja bagi peserta pemagangan. Keterlibatan dunia usaha menjadi faktor kunci karena mereka memiliki informasi langsung mengenai kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan dinamika pasar. Sementara itu, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk kurikulum pelatihan berbasis kompetensi yang lebih terstruktur dan aplikatif. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penghubung antara aspek teoritis dan praktik lapangan, sehingga proses pemagangan tidak berjalan secara informal, tetapi memiliki standar capaian yang jelas.

Kolaborasi antaraktor yang terbangun dalam kegiatan ini menghasilkan sejumlah output penting yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas rehabilitasi ekonomi. Pertama, tersusunnya kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal yang memungkinkan kesesuaian antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, tersedianya mentor dari dunia usaha yang berperan dalam memberikan pembimbingan langsung kepada peserta pemagangan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Ketiga, adanya fasilitasi penempatan kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program, yang

menunjukkan adanya kesinambungan antara proses pelatihan dan akses terhadap peluang kerja.

Selain itu, kolaborasi ini juga menghasilkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih terbuka antaraktor, khususnya terkait kebutuhan tenaga kerja dan potensi sektor ekonomi lokal yang dapat dikembangkan pascabencana. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pelatihan dan pengembangan program pemagangan agar lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Tidak hanya itu, kolaborasi juga berkontribusi dalam proses identifikasi sektor ekonomi potensial pascabencana, seperti perdagangan lokal, jasa, dan pengolahan produk berbasis sumber daya daerah, yang dapat menjadi fokus pengembangan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam perspektif *collaborative governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahap kolaborasi yang terjadi masih berada pada fase awal menuju konsolidasi (*nascent to intermediate stage*). Pada tahap ini, meskipun sudah terdapat kesadaran bersama dan pembagian peran, namun struktur kelembagaan yang kuat belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan kolaboratif melalui pembentukan forum koordinasi permanen, penguatan regulasi daerah, serta pengembangan mekanisme komunikasi lintas sektor yang lebih sistematis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kolaborasi antaraktor merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan rehabilitasi ekonomi pascabanjir. Tanpa adanya kelembagaan kolaboratif yang kuat dan berkelanjutan, maka program pemulihan ekonomi akan cenderung berjalan parsial dan tidak memiliki dampak jangka panjang yang optimal. Oleh sebab itu, pengembangan model kolaborasi yang lebih terstruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan program pemagangan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi ekonomi berbasis *collaborative governance*.

### **Faktor Pendukung dan Hambatan**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi ekonomi pascabanjir berbasis pemagangan di Kabupaten Pidie Jaya tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan program dapat berjalan secara efektif meskipun

masih dalam tahap pengembangan. Secara umum, faktor pendukung tersebut mencerminkan adanya sinergi awal antaraktor yang terlibat dalam kerangka collaborative governance, meskipun belum sepenuhnya terlembaga secara kuat.

Faktor pendukung pertama adalah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Komitmen ini terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah dalam proses perencanaan, fasilitasi koordinasi antarinstansi, serta dukungan terhadap pelaksanaan program pemagangan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi ekonomi. Peran pemerintah sebagai policy driver menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah pascabencana.

Faktor pendukung kedua adalah keterlibatan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam program pemagangan. Dunia usaha tidak hanya berperan sebagai penyedia tempat praktik kerja, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran berbasis pengalaman industri nyata. Keterlibatan ini memberikan nilai tambah yang signifikan karena peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memahami standar kerja, etos kerja, serta dinamika dunia industri secara langsung. Hal ini memperkuat relevansi program dengan kebutuhan pasar kerja.

Faktor pendukung ketiga adalah kapasitas lembaga pelatihan dalam pengembangan kompetensi masyarakat. Lembaga pelatihan memiliki peran penting dalam menyusun kurikulum berbasis kebutuhan industri serta menyediakan instruktur yang kompeten. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa proses pemagangan tidak berlangsung secara informal, tetapi memiliki struktur pembelajaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Dengan demikian, kualitas output program dapat lebih terjamin.

Faktor pendukung keempat adalah antusiasme masyarakat dalam mengikuti program pemagangan. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan nyata untuk meningkatkan keterampilan kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi pascabencana. Antusiasme ini juga menjadi indikator penting bahwa masyarakat memiliki kesiapan untuk bertransformasi dari kondisi rentan menuju kemandirian ekonomi melalui proses pembelajaran berbasis praktik.

Meskipun terdapat faktor pendukung yang cukup kuat, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang mempengaruhi



optimalisasi pelaksanaan program. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam rehabilitasi ekonomi bukan terletak pada konsep program, melainkan pada aspek implementasi, kelembagaan, dan keberlanjutan.

Hambatan pertama adalah keterbatasan anggaran program. Keterbatasan ini berdampak pada terbatasnya jumlah peserta yang dapat dijangkau, intensitas pelatihan, serta fasilitas pendukung pemagangan. Kondisi ini menyebabkan skala program belum dapat diperluas secara optimal untuk menjangkau seluruh masyarakat terdampak banjir.

Hambatan kedua adalah minimnya jumlah mitra industri yang bersedia terlibat dalam program. Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua peserta dapat memperoleh tempat pemagangan yang sesuai dengan bidang keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan mitra juga berdampak pada terbatasnya variasi pengalaman kerja yang dapat diperoleh peserta.

Hambatan ketiga adalah koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Meskipun telah terdapat upaya kolaborasi antaraktor, namun mekanisme koordinasi masih bersifat informal dan belum didukung oleh sistem yang terstruktur. Akibatnya, sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program belum berjalan secara konsisten.

Hambatan keempat adalah belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi program masih dilakukan secara parsial dan belum mencakup dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi peserta. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program secara komprehensif, terutama dalam konteks keberlanjutan hasil pemagangan.

Hambatan kelima adalah belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur pemagangan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi ekonomi pascabencana. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan program masih bergantung pada inisiatif proyek atau kegiatan sementara, sehingga belum menjadi bagian dari kebijakan permanen pemerintah daerah.

Secara analitis, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program berada pada aspek kelembagaan dan keberlanjutan sistem, bukan pada substansi konsep pemagangan itu sendiri. Dengan kata lain, program ini secara konseptual telah relevan dan efektif, namun masih membutuhkan penguatan dalam hal regulasi, koordinasi, pendanaan, serta sistem evaluasi agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan faktor pendukung dan penanganan hambatan secara sistematis menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa program rehabilitasi ekonomi berbasis pemagangan dapat berkembang dari tahap implementasi awal menuju model kebijakan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam kerangka collaborative governance.

### **B. Pembahasan**

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) melalui rehabilitasi ekonomi pascabanjir berbasis pemagangan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance mampu menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial atau rehabilitasi fisik semata, tetapi harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, hasil kegiatan PKM ini membuktikan bahwa program pemagangan menjadi instrumen yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha sehingga proses rehabilitasi ekonomi berlangsung secara lebih berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan judul "Rehabilitasi dan Collaborative Governance dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Pemagangan di Kabupaten Pidie Jaya", maka seluruh hasil kegiatan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara ketiga konsep utama tersebut. Pertama, aspek rehabilitasi tercermin dari upaya memulihkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi kerja, bukan hanya melalui pemberian bantuan material. Kedua, aspek collaborative governance terlihat dari keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program secara bersama-sama sesuai dengan pembagian peran masing-masing. Ketiga, aspek pemagangan menjadi media pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan maupun peluang berwirausaha. Dengan demikian, hasil PKM telah menjawab fokus utama judul penelitian bahwa rehabilitasi ekonomi pascabanjir akan lebih efektif apabila

dilaksanakan melalui kolaborasi multipihak yang didukung oleh program pemagangan.

Hasil kegiatan juga memperkuat teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan melalui dialog, pembagian tanggung jawab, serta pembangunan kepercayaan. Pada kegiatan PKM ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator, dunia usaha menyediakan tempat pemagangan, lembaga pelatihan mengembangkan kompetensi peserta, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan ekonomi. Meskipun kolaborasi yang terbentuk masih berada pada tahap awal, sinergi tersebut telah menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pascabencana membutuhkan tata kelola yang bersifat kolaboratif dibandingkan pendekatan sektoral.

Selain memperkuat tata kelola kolaboratif, hasil PKM menunjukkan bahwa program pemagangan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat terdampak banjir. Peningkatan hard skills dan soft skills yang diperoleh peserta mendorong meningkatnya daya saing tenaga kerja, memperbesar peluang memperoleh pekerjaan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun usaha secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan kompetensi manusia memiliki pengaruh langsung terhadap percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Dari sisi dampak, kegiatan PKM menghasilkan dampak pada tiga tingkatan. Dampak bagi masyarakat terlihat dari meningkatnya keterampilan kerja, bertambahnya kepercayaan diri peserta, munculnya peluang usaha baru, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dampak bagi pemerintah daerah adalah tersedianya model rehabilitasi ekonomi berbasis pemberdayaan yang dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam penanganan pascabencana sehingga program pemulihan tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak bagi dunia usaha dan lembaga pelatihan adalah terbentuknya kemitraan yang lebih erat dalam penyediaan tenaga kerja

yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial dalam pembangunan daerah.

Lebih jauh, pelaksanaan PKM ini juga memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi lokal. Peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha mandiri berpotensi menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) berupa meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, serta berkembangnya usaha mikro berbasis potensi lokal. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa program pemagangan bukan hanya menghasilkan manfaat bagi individu peserta, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.

Meskipun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, regulasi, pendanaan, dan perluasan kemitraan dengan dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pemagangan ke dalam kebijakan rehabilitasi pascabencana sehingga kolaborasi yang telah terbentuk tidak berhenti sebagai program pengabdian, tetapi berkembang menjadi sistem pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, model rehabilitasi ekonomi berbasis *collaborative governance* dan pemagangan dapat direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik bencana serupa sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

## KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa rehabilitasi ekonomi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya melalui pendekatan *collaborative governance* berbasis pemagangan mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan keterampilan kerja dan kemandirian ekonomi.

Implementasi *collaborative governance* telah melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat,

meskipun kolaborasi yang terbentuk masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terlembaga. Program pemagangan terbukti meningkatkan hard skills dan soft skills peserta serta membuka peluang kerja dan usaha baru.

Keberhasilan program didukung oleh komitmen pemerintah, keterlibatan mitra, dan partisipasi masyarakat, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya mitra industri, serta belum optimalnya koordinasi dan regulasi pendukung. Secara keseluruhan, model ini berpotensi menjadi strategi rehabilitasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan penguatan kelembagaan dan kebijakan yang lebih terintegrasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya. (2025). *Kabupaten Pidie Jaya dalam angka 2025*. Meureudu: BPS Kabupaten Pidie Jaya.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Jakarta: BNPB
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2020–2024*. Jakarta: BNPB.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penyelenggaraan pemagangan dalam negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai  
Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: UNDRR.

United Nations Development Programme. (2021). *Human development  
report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*. New York: UNDP.

World Bank. (2022). *Building resilience: Integrating climate and disaster risk  
into development*. Washington, DC: World Bank.